



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. SE/00081/PK/10/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan menindaklanjuti pengumuman Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 **Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 (SE-20/2021)** dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta *pilot project* pembukaan kembali sektor pariwisata, maka diperlukan penyesuaian mekanisme mobilitas dan pengaturan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginformasikan mengenai **hal-hal pokok baru** yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang akan dijalankan Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Kategori WNA pelaku perjalanan dari luar negeri yang diizinkan masuk ke Indonesia mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
2. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia masih mengikuti ketentuan kategori WNA yang diijinkan memasuki Indonesia, ketentuan vaksinasi, ketentuan PCR test dan kekarantinaan. Namun demikian **terdapat penyesuaian kembali dalam SE Nomor 20 Tahun 2021**, yaitu:
 - a. Ketentuan isolasi mandiri di hotel berubah dari 8 x 24 jam menjadi **5 x 24 jam**, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri oleh WNA.
 - b. Kepala Perwakilan Asing diplomatik dan keluarga dapat melakukan isolasi mandiri di kediaman diplomatik selama **5 x 24 jam dan melaporkan hasil tes RT-PCR nya kepada Satuan Tugas Covid-19 melalui Kementerian Luar Negeri**; dan
 - c. Pengambilan RT-PCR dilakukan **2 kali** yaitu **1 x 24 jam** setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan **4 x 24 jam** saat menjalani karantina sebelum menyelesaikan masa isolasi wajib **5 x 24 jam**.
3. Setiap pelaku perjalanan internasional yang akan memasuki wilayah Indonesia, wajib **menggunakan aplikasi PeduliLindungi.id** sebagai syarat perjalanan domestik dan internasional dari Indonesia.

4. Pelaku Perjalanan Internasional berstatus Warga Negara Asing (WNA) **dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia** dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a. Melalui titik masuk (*entry point*) bandar udara (bandara) di Bali dan Kepulauan Riau (Pelabuhan);
- b. Berdasarkan **SK Satuan Tugas Nomor 15 Tahun 2021 tentang 19 Negara Asing Warga Negaranya Diijinkan Datang Ke Indonesia** sebagai pelaku perjalanan internasional yang akan berwisata ke Bali adalah: Bahrain, Tiongkok, Hungaria, India, Italia, Jepang, Republik Korea, Kuwait, Liechtenstein, Norwegia, Prancis, Persatuan Arab Emirat, Polandia, Portugal, Qatar, Arab Saudi, Selandia Baru, Spanyol dan Swedia. Penentuan jumlah negara ini bersifat sementara dan dilakukan secara hati-hati dan bertahap bagi 19 negara memperhatikan pertimbangan: laporan WHO terkait *positivity rate* $\leq 5\%$ dan jumlah kasus konfirmasi ≤ 20 per 100.000 penduduk, kesiapan infrastruktur Bali menerima wisatawan asing, pengaturan TCA/MRA, potensi kunjungan dan pertumbuhan wisatawan asing yang tinggi dari negara tersebut, dan ketersediaan *direct flight* dengan Indonesia.

Catatan: Akan dilakukan reviu secara berkala untuk updating negara-negara target asal wisatawan asing, baik penambahan negara maupun pengurangan negara.

- c. Menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR, pelaku perjalanan untuk tujuan wisata yang telah memiliki Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
- e. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

Kementerian menyampaikan lebih lanjut bahwa ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2021 di atas berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2021 hingga pemberitahuan perubahannya lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu



No. D/ /10/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and to follow up on the announcement of the National Task Force for Covid-19 Handling **Circular Letter Number 20 Year 2021 concerning International Travel Health Protocols during the COVID-19 Pandemic (SE-20/2021)**, within the framework of handling the Covid-19 pandemic and national economic recovery, as well as conducting the pilot project to re-opening the tourism sector, there is a necessity on the adjustment on mobility mechanisms and health protocol arrangements for international travelers.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia conveys the following updates of policies that will be carried out by the National Task Force on Handling Covid-19 to all Foreign Missions and International Organizations (OI):

1. The category of foreigners who are allowed to enter Indonesia refers to:
 - a. The regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 34 of 2021 concerning the Granting of Visas and Stay Permits in the Period of Handling the Spread of Covid-19 and National Economic Recovery.
 - b. Bilateral travel corridor arrangement (TCA) agreement scheme; and/or
 - c. Obtain special consideration/permission in writing from the Ministry/ Institution.
2. International travelers, both Indonesians and Foreign Nationals entering the territory of the Republic of Indonesia still follow the previous provisions such as: vaccination provisions, PCR test provisions and quarantine, with adjustment as stipulated in SE Number 20 of 2021, namely:
 - a. Hotel quarantine changed from 8 x 24 hours to **5 x 24 hours**, with the entire cost borne independently by the traveller.
 - b. Head of foreign missions and their families are entitled to self-quarantine in their designated residences for **5 x 24 hours** and report the results of Rt-PCR tests to the Covid-19 Task Force through the Ministry of Foreign Affairs; and
 - c. RT-PCR Test is conducted 2 times, **1 x 24 hours** after arrival in the Republic of Indonesia; and **4 x 24 hours** while undergoing quarantine before completing the mandatory quarantine period of **5 x 24 hours**.
3. International traveller entering the territory of Indonesia, must use the application PeduliLindungi.id as a pre-condition of domestic and international travel.
4. Foreign Nationals with the purpose of tourism are allow to enter the territory of Indonesia with the following provisions / requirements:
 - a. The entry points are: Bali International Airport and Riau Islands Port;
 - b. During this pilot project, the countries granted entry permits for tourism in Bali are: Bahrain, China, Hungary, India, Italy, Japan, Republic Korea, Kuwait, Liechtenstein, Norway, France, United Arab Emirates, Poland, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, New Zealand, Spain and Sweden. The determination of the number of countries is temporary and is carried out carefully and gradually for 19 countries taking into account

the following considerations: WHO reports related to positivity rate < 5% and number of confirmed cases < 20 per 100,000 population, infrastructure readiness of Bali to accept foreign tourists, TCA/MRA arrangements, the potential for visits and growth of high foreign tourists from the country, and the availability of direct flights with Indonesia.

Note: Periodic reviews will be carried out to update the target countries of origin of foreign tourists, either adding countries or reducing countries.

- c. Certificate of full dose COVID-19 vaccine and a negative RT-PCR test result prior the departure. Travelers for tourist purposes must apply for visitor visa or other entry permit in accordance with applicable laws and regulations;
- d. Health insurance with a coverage value of at least USD 100,000 that covers the handling COVID-19; and
- e. Booking confirmation of accommodation place from the accommodation provider while staying in Indonesia.

Furthermore, the Ministry conveys that the provisions of the Circular Letter of the National Task Force for Covid-19 Handling Circular Letter Number 20 Year 2021 as stated above valid from October 14, 2021 until further notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, October 15, 2021

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling

- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
- Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
- Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Public Information and Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs